LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-03/PJ/2019
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL

A. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN FISKAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ...
KANTOR PELAYANAN PAJAK ...
JALAN .....
TELEPON ...; FAKSIMILE ...; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL : pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN FISKAL

Nomor : SKF-...../20.... (1)
Tanggal : ..... (2)

Berdasarkan hasil penelitian sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, kami sampaikan bahwa Wajib Pajak:

Nama : ..... (3)
NPWP : ..... (4)
Alamat : ..... (5)
KPP Terdaftar : ..... (6)
Kode Verifikasi SKF : ..... (7)
sampai dengan tanggal ..... (8) telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan persyaratan pada ketentuan peraturan penerbitan Surat Keterangan Fiskal.

Surat Keterangan Fiskal ini dibuat dalam rangka .....(9), yang berlaku mulai tanggal .....(10) sampai dengan tanggal .....(11). Surat Keterangan Fiskal ini berlaku juga untuk Wajib Pajak Cabang apabila ada.

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan:
1. Kode Verifikasi SKF digunakan sebagai otorisasi Wajib Pajak kepada Kementerian/Lembaga atau pihak lain untuk melakukan konfirmasi kebenaran SKF.
2. Kode Verifikasi SKF dapat digunakan untuk mengkonfirmasi kebenaran SKF melalui Portal DJP. Kring Pajak, atau KPP/KP2KP.
3. SKF ini merupakan informasi yang ada di sistem administrasi perpajakan Wajib Pajak pada tanggal diterbitkannya SKF.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN FISKAL

Nomor (1)	:	Diisi dengan nomor surat
Nomor (2)	:	Diisi dengan tanggal penerbitan SKF
Nomor (3)	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak
Nomor (4)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
Nomor (5)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Nomor (6)	:	Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
Nomor (7)	:	Diisi dengan Kode Verifikasi SKF
Nomor (8)	:	Diisi dengan tanggal mengajukan SKF melalui sistem informasi *online* atau disampaikan permohonan
Nomor (9)	:	Diisi dengan tujuan penggunaan SKF sebagaimana tercantum dalam sistem informasi *online* "Contoh: permohonan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan"
Nomor (10)	:	Diisi dengan tanggal diterbitkannya SKF
Nomor (11)	:	Diisi dengan tanggal berakhirnya masa berlaku SKF

B. CONTOH FORMAT FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN FISKAL

Nomor : ..... (1) ....., ...(3)
Lampiran : ..... (2)
Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Fiskal

Yth. Direktur Jenderal Pajak
c.q. Kepala KPP ..... (4)
di .....(5)

Sehubungan dengan diperlukannya Surat Keterangan Fiskal sebagai persyaratan dalam rangka .....(6), dengan ini:

Nama : ..... (7)
NPWP : ..... (8)
Alamat : ..... (9)
Surel Aktif : ..... (10)

bertindak:

☐ atas nama diri sendiri.

☐ sebagai pengurus*) dari Wajib Pajak badan:
Nama : ..... (11)
NPWP : ..... (12)
Alamat : ..... (13)
Surel Aktif : ..... (14)

mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Fiskal dan bersama ini menyatakan bahwa:

1. telah menyampaikan:
   a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan/atau
   b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 3 (tiga) Masa Pajak Pertambahan Nilai terakhir,
   yang telah menjadi kewajiban Wajib Pajak.
2. tidak memiliki Utang Pajak atau memiliki Utang Pajak namun telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak: dan
3. tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan yaitu pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, penyidikan, atau penuntutan.

Demikian surat permohonan disampaikan dengan menyadari sepenuhnya bahwa:

1. SKF digunakan dalam rangka memperoleh pelayanan atau pelaksanaan kegiatan tertentu sesuai tujuan diajukannya permohonan.
2. SKF bukan merupakan pernyataan yang menghilangkan wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penetapan besarnya pajak yang terutang, melakukan penagihan utang pajak, dan/atau mengenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Wajib Pajak/Pengurus **

.....

* Pimpinan tertinggi atau pengurus yang diberikan wewenang untuk menjalankan kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN FISKAL

Nomor (1)	:	Diisi dengan nomor surat
Nomor (2)	:	Diisi dengan lampiran surat
Nomor (3)	:	Diisi dengan tempat dan tanggal surat
Nomor (4)	:	Diisi dengan nama KPP tempat diajukan permohonan
Nomor (5)	:	Diisi dengan alamat KPP tempat diajukan permohonan
Nomor (6)	:	Diisi dengan tujuan penggunaan Surat Keterangan Fiskal "Contoh: permohonan fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan"
Nomor (7)	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak, Kuasa Wajib Pajak Orang Pribadi, atau Pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan
Nomor (8)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak, Kuasa Wajib Pajak Orang Pribadi, atau Pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan
Nomor (9)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak, Kuasa Wajib Pajak Orang Pribadi, atau Pengurus dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan
Nomor (10)	:	Diisi dengan surel aktif Wajib Pajak Orang Pribadi.
Nomor (11)	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak atau tidak diisi dalam hal diajukan Wajib Pajak Orang Pribadi tanpa melalui Kuasa.
Nomor (12)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau tidak diisi dalam hal diajukan Wajib Pajak Orang Pribadi tanpa melalui Kuasa.
Nomor (13)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak atau tidak diisi dalam hal diajukan Wajib Pajak Orang Pribadi tanpa melalui Kuasa.
Nomor (14)	:	Diisi dengan surel aktif Wajib Pajak Badan.
**)	:	Coret salah satu yang tidak sesuai.

C. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ...
KANTOR PELAYANAN PAJAK ...
JALAN .....
TELEPON ...; FAKSIMILE ...; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL : pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENOLAKAN PEMBERIAN
SURAT KETERANGAN FISKAL

Nomor : SPSKF-...../20.... (1)
Tanggal : ..... (2)

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa kepada Wajib Pajak:

Nama : ..... (3)
NPWP : ..... (4)
Alamat : ..... (5)
KPP Terdaftar : ..... (6)

tidak dapat diberikan Surat Keterangan Fiskal karena:

- ☐ Sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- ☐ Tidak menyampaikan SPT Tahunan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak;
- ☐ Tidak menyampaikan/hanya menyampaikan sebagian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak; dan/atau
- ☐ Terdapat Utang Pajak yang belum dilunasi*.

Demikian untuk dimaklumi.

Keterangan:
*) untuk mengetahui detail informasi utang pajak yang belum dilunasi. Wajib Pajak dapat menghubungi *Account Representative* di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL

Nomor (1)	:	Diisi dengan nomor surat
Nomor (2)	:	Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Penolakan Pemberian SKF
Nomor (3)	:	Diisi dengan Nama Wajib Pajak
Nomor (4)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
Nomor (5)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak
Nomor (6)	:	Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ROBERT PAKPAHAN